

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan yang demokrasi seperti halnya di negara Indonesia, partai politik merupakan elemen yang wajib ada di suatu negara yang menjalankan sistem demokrasi. Bahkan banyak teori yang menyatakan bahwasannya tidak ada demokrasi ketika tidak ada partai politik didalamnya, karena partai politiklah yang menjadi nahkoda penting dalam menjalankan sistem demokrasi. Karena ketika tidak ada penyeimbang dari penguasa maka kecenderungannya adalah kekuasaan tersebut akan disalahgunakan dan tentunya masyarakat yang akan dirugikan melalui kebijakan-kebijakan yang ada.

Partai politik pada umumnya masih banyak yang belum memahami arti dan fungsi yang seharusnya dijalankan. Hal tersebut terbukti bahwasannya masih banyak aspirasi masyarakat yang belum tersalurkan dengan baik dikarenakan partai politik hanya berfungsi menyalurkan kepentingan dari elit partai politik. Seharusnya, partai politik memperjuangkan kepentingan elit politik anggota, masyarakat, bangsa dan negaranya. Undang-undang No 2 Tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwasannya, partai politik adalah *"organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

Partai politik saat ini lebih disibukan dengan kegiatan mengurus diri sendiri demi elit pengurus partai politik sehingga masing-masing partai politik berjalan sendiri dan terpisah dengan masyarakat. Sudah seharusnya partai politik mengambil alih peran dan

tanggung jawab demi terlaksananya sistem demokrasi yang menjadi dasar bangsa Indonesia.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, partai politik memiliki sejumlah fungsi diantaranya yaitu "seperti fungsi komunikasi politik, fungsi sosialisasi politik, fungsi rekrutmen politik dan fungsi sarana pengatur konflik" (Budiarjo, 2008). Munculnya permasalahan-permasalahan dalam dunia politik disebabkan oleh tidak berjalannya fungsi dari partai politik tersebut.

Fungsi dari komunikasi politik itu sendiri selama ini hanya pada saat menjelang atau selama pemilu. Pengurus partai rajin mendekati masyarakat dengan harapan mendapatkan dukungan suara dengan cara mengarahkan dukungan ke kandidat calon pilihan partai, bukan dalam rangka mendekati masyarakat untuk menjangkau permasalahan-permasalahan politik yang menjadi dilema dimasyarakat. Keberadaan partai politik seharusnya menjadi wadah atau naungan oleh masyarakat sebagai media penggabungan aspirasi. Anggota masyarakat yang sependapat dengan partai politik agar dapat diartikulasikan secara terstruktur atau teratur. Langkah selanjutnya yang seharusnya partai politik lakukan yaitu menjadikan aspirasi tersebut suatu usulan kebijakan kepada pemerintah agar menjadi suatu kebijakan publik.

Fungsi sosialisasi politik idealnya mampu mengembembangkan, mendidik, dan membangun orientasi anggota-anggota partainya serta masyarakat luas agar sadar akan peran dan tanggung jawab sebagainya sebagai warga negara. Fungsi ini pun tidak berjalan dengan semestinya, hal tersebut lagi-lagi hanya terjadi ketika menjelang sampai dengan pelaksanaan pemilihan umum, yaitu partai-partai sibuk membina kader dan simpatisannya untuk mensosialisasikan visi dan misi dari partai dan calon kandidatnya. Sosialisasi

hanya dimaksudkan untuk mendapatkan simpati serta dukungan masyarakat. Akan tetapi, partai politik lupa akan tugas dan fungsi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

Fungsi rekrutmen politik juga tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan oleh partai politik harapan nya untuk memperluas jaringan sehingga regenerasi kepengurusan tetap ada serta juga melakukan bimbingan dan pembelajaran terkait politik akan tetapi fakta yang terjadi tidak sedemikian rupa. Partai politik hanya gencar mencari masyarakat yang bersedia untuk menjadi anggota ketika mendekati pemilihan umum saja.

Fungsi mengelola konflik dilakukan oleh partai politik guna konflik yang terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh dinamika demokrasi tidak sangat buruk. Fakta yang terjadi masyarakat di Indonesia sangat mudah terpancing dengan isu demokrasi sehingga menimbulkan konflik disinilah seharusnya partai politik menjadi penengah untuk memediasi konflik tersebut.

Fungsi-fungsi di atas menjelaskan bahawasannya peran partai politik di Indonesia masih belum berjalan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 31 Tahun 2002 tentang partai politik. Salah satu penyebab tidak berjalan fungsi-fungsi partai politik yaitu karena masih kuat nya kecenderungan suatu partai untuk memperjuangkan kepentingan golongan nya di atas kepentingan masyarakat. Terkadang aspirasi anggota partai tidak didengar bagaimana ingin menyalurkan aspirasi masyarakat.

Apabila kondisi ini terus berkelanjutan maka sulit bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembangan menjadi bangsa yang besar. Dikarenakan para pejabat tinggi yang di pilih oleh rakyat untuk memperjuangkan hak rakyat tidak meperhatikan rakyatnya akan tetapi sibuk dengan agenda nya untuk tetap memperkaya diri sendiri dan golongannya. Selama ini partai politik kurang memperhatikan pentingnya memberikan

pendidikan politik kepada anggotanya sebelum terjun lebih jauh ke dunia perpolitikan. Pendidikan politik memang sudah di ajarkan di bangku sekolah, akan tetapi hanya sebatas pengenalan saja tidak dibahas secara keseluruhan.

Selain pendidikan politik pendidikan karakter juga perlu diberikan kepada anggota partai karena hal ini lah yang menjadi modal utama untuk para elit partai politik untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Selain itu juga pendidikan karakter akan menciptakan cerminan seseorang baik atau buruknya. Di era ini kejujuran nampaknya sudah sangat susah di temukan terutama di kelompok politikus, baik yang duduk di legislatif maupun yang menjadi kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwasannya output kader pilihan partai politik tidak cukup berkualitas secara moral. Timbul sebuah pertanyaan, apakah partai politik sudah menjalankan proses kepartaian dengan baik dan benar sesuai prosedur? hal seperti ini yang harus di perhatikan oleh partai politik agar fungsi fungsi dari partai politik lebih di perhatikan.

Kecenderungan partai politik yang hanya aktif ketika menjelang pesta demokrasi tiba membuat masyarakat kurang percaya terhadap partai. Seperti yang terjadi pada saat ini banyak partai politik yang memanfaatkan media masa untuk melakukan kampanye guna memperoleh simpati dari masyarakat untuk memilih partai tersebut seperti contohnya partai Hanura, Gerindra, Perindo dan partai partai lainnya. Selain itu juga, kesadaran masyarakat untuk tidak golput masih sangat rendah hal tersebut membuktikan bahwasannya masyarakat masih belum percaya terhadap partai politik. Selain itu juga masih banyak sekali anggota dari partai politik yang terindikasi kasus korupsi dan tertangkap oleh KPK, akan tetapi lain halnya dengan PKS, dimana partai ini mampu untuk melaksanakan kinerjanya bukan hanya ketika musim pemilu tiba. Karena pada dasarnya PKS mempunyai tindakan yang kongkret dalam pendidikan politik hal tersebut

terbukti dari adanya target bahwa setiap satu kader PKS harus membina 24 orang dalam menghadapi pemilu.

Berakhirnya rezim orde baru dinamika tentang islam dan politik kembali mencuat ke ranah publik yang ditandai setidaknya oleh tiga momentum. *Pertama*, banyaknya partai islam yang bermunculan setiap menjelang pemilu. Pada pemilu 1999 ada 20 partai islam yang menjadi peserta pemilu, pada pemilu 2004 ada enam partai islam, dan pada pemilu 2009 ada empat partai islam. *Kedua*, terjadinya perdebatan tentang dasar negara saat sidang tahunan MPR yang membahas amandeman UUD'45. Sebagian fraksi dalam DPR RI memperjuangkan kembali piagam jakarta sebagai dasar negara. Momentum yang demikian didukung oleh sejumlah aksi yang terjadi di beberapa daerah. *Ketiga*, munculnya fenomena terorisme sejak peristiwa hancurnya gedung WTC (11 September 2001) sebagai lambang keperkasaan negara Amerika. Akibatnya, sejumlah aksi terorisme domestik terjadi di tanah air. (Hamdi, 2012).

Beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi peneliti memilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai Obyek penelitian antara lain: *Pertama*, PKS pada pemilu 2004 memperoleh kenaikan yang sangat signifikan, yaitu dari hanya 1,3 persen pada pemilu 1999 menjadi 7,3 persen pada pemilu 2004. Kenaikan perolehan suara ini tidak lepas dari kemampuan PKS untuk membangun partai kader yang cukup solid.

Kedua, PKS memenangkan pemilu 2009 dan 2014 di daerah pemilihan antara lain, di DKI Jakarta yang dapat dikatakan sebagai salah satu barometer demokrasi di Indonesia. Karakteristik pemilih di DKI Jakarta adalah pemilih yang mayoritas pemilihnya kaum terpelajar serta bertempat tinggal di daerah perkotaan. Tidak jauh berbeda dengan Kota Yogyakarta, dimana Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang mayoritas pemilihnya kaum terpelajar serta bertempat tinggal di daerah perkotaan. Partai Keadilan

Sejahtera yang mampu bersaing dengan partai besar lainnya yang sudah mempunyai basis massa yang cukup besar. Pada pemilu legislatif Kota Yogyakarta tahun 2009-2014, PKS berhasil memperoleh 4 kursi, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi suatu partai politik dan perlu adanya evaluasi terus menerus untuk menjaga eksistensi dan meningkatkan basis masa pendukungnya.

Kehidupan partai politik di Indonesia masih cenderung mengedepankan kepentingan politik praktis dan mengesampingkan nilai-nilai ideologi. Demi kepentingan kekuasaan, partai politik akan berlomba-lomba mencari dan merekrut berbagai macam basis pemilih. Untuk dapat memwadahi semua basis pemilih tentu hal ini akan menjadikan ideologi partai tidak lagi menjadi tola ukur dalam menyusun suatu kebijakan dan menetapkan suatu keputusan.

Proses perekrutan anggota partai politik tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang baik. Siapapun yang bersedia untuk membayar sejumlah uang yang ditetapkan oleh partai politik dapat direkrut dan ditetapkan menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, ataupun calon kepala daerah. Kemampuan berpolitik kalah saing dibandingkan dengan materi yang dijadikan ukuran pantas atau tidak pantas seseorang direkrut oleh partai politik. Dari banyaknya partai Islam di Indonesia mungkin hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang secara transparansi menyatakan proses pengkaderannya dengan jelas. PKS juga memiliki jalur kaderisasi yang kuat.

Lahirnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak terlepas dari peran partai yang sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK). Transformasi PK menjadi PKS dikarenakan pada pemilu tahun 1999, PK tidak mampu mencapai ambang batas parlemen sebesar 2%. Hal inilah yang menjadi dasar atas perubahan nama Partai Keadilan berganti nama serta lambang untuk dapat mengikuti pemilu tahun 2004. Selanjutnya PK berganti nama dan

disahkan menjadi Partai Keadilan Sejahtera yang dipakai secara resmi sejak tanggal 2 Juli 2003. (Setya dalam Efrina, 2009)

Sistem Pengkaderan yang dijalankan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dimulai dari proses rekrutmen peserta tarbiyah. Proses perekrutan dilakukan dengan memanfaatkan komunitas yang sudah ada seperti lembaga dakwah sekolah, lembaga dakwah kampus dan lembaga dakwah lainnya. Mereka yang direkrut dan mengikuti proses perekrutan tidak bisa langsung menjadi anggota partai melainkan harus melewati beberapa tingkatan yang dimulai dari kader anggota pemula, anggota muda, anggota madya, anggota dewasa, anggota ahli, anggota purna, dan anggota kehormatan. Hubungan fungsional dari masing masing tingkatan terlihat dari materi pendidikan politik yang diberikan sebagai pentahapan pendidikan politik.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempunyai karakteristik sebagai partai politik massa yang begitu agresif. Secara ideologis, PKS menentukan pilihannya sebagai partai islam yang berbasiskan tarbiyah. Fenomena politik islam yang diwakili oleh PKS yang percaya pada jalur demokrasi untuk mendapatkan kekuasaan menarik untuk dikaji lebih jauh.

Gerakan tarbiyah banyak disebut-sebut sebagai inspirator PKS karena beberapa dari para pendiri PK pada tahun 1998 sebagai reaksi dari tekanan politik yang diberikan oleh Orba pada gerakan islam. Dalam pemilu 1999 PK mempunyai anggota 60.000 orang dan ketika sudah berubah menjadi pks pada pertengahan 2003 anggota partainya mencapai 300.000. pembukaan diri PKS pada dasarnya bukan hanya untuk menarik dukungan yang menunjukkan bentuk partai terbuka karena permainan sistematik merka tetap dipegang oleh kader-kader yang telah disiapkan sebelumnya. (Aminuddin, 2010)

Sebagai partai politik, PKS tentu melakukan komunikasi politik yang dilakukan, baik dari segi pemikiran, aktivitas, tindakan, pengambilan keputusan serta pembuatan

kebijakan tidak terlepas dari keterbukaan ideologi partai yang mereka usung sampai saat ini. Keterbukaan ideologi tersebut menimbulkan citra baru bagi PKS, yang awalnya eksklusif menjadi inklusif. Komunikasi politik dalam suatu partai politik merupakan penghubung segala informasi ataupun pesan baik berbentuk verbal maupun non verbal terhadap masyarakat luas maupun anggota partai politik itu sendiri

Partai Keadilan Sejahtera dengan basis partai dakwah dan lebih mengedepankan nilai-nilai islami menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian lebih jauh mengapa demikian, dikarenakan PKS sebagai partai kader yang mampu membangun citra positif dan mampu mencerminkan perilaku politik dan kinerja parpol yang islami tanpa harus bersikap ekstrim. Selain itu juga PKS dalam menentukan dan menetapkan suatu kebijakan sangat transparansi dan hal ini yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. PKS merupakan simbol partai modern yang tidak mengandalkan figur sebagai pemersatu atau penggerak partai, akan tetapi lebih kepada bekerja atas dasar sistem dengan menempatkan kader di semua lini organisasi sebagai tokoh yang bersih, jujur, terpelajar, dan berwawasan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas menarik untuk diteliti lebih lanjut, maka dengan demikian penulis memilih judul **“Peran Elit Partai Politik Dalam Melayani Masyarakat (Studi Kasus: Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta Tahun 2017)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam melayani masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2017?

2. Faktor apa saja yang menjadi penghalang elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam melayani masyarakat Kota Yogyakarta Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar peran yang dilakukan oleh elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baik yang telah terpilih menjadi anggota dewan ataupun anggota partai politik.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penghalang elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam melayani masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap pengkajian tentang partai politik di Indonesia, serta untuk menambah pengetahuan terutama dalam bidang ilmu sosial dan politik

2. Manfaat Praktis :

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk masyarakat dalam hal memilih saat pemilihan umum, Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal pembelajaran kepada elit partai politik dalam membenahi partai politik dan elit politik yang telah terpilih menjadi anggota dewan khususnya.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Konsep Partai Politik

a. Definisi Partai Politik

Secara Umum partai politik dapat didefinisikan sebagai kumpulan orang-orang yang mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama untuk mencapai suatu kedudukan tertentu.

Menurut pasal 1 UU No 2 Tahun 2008 tentang partai politik menjelaskan bahwa partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kebersamaan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Banyak sekali para ilmuwan yang mendefinisikan partai politik. Berikut ini beberapa pemaparan contoh definisi tentang partai politik.

Menurut Carl J. Friedrich (dalam Budiarjo, 2008: 404) “Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideologi serta materiil”. *“(a political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leader the control of a government, with the further objective of giving to member of the party, through such control ideal and material benefits and advantages)”*

Definisi tersebut menekankan bahwa tujuan dari terbentuknya partai politik yaitu untuk merebut dan mempertahankan fungsi dan pengawasan terhadap pemerintah. Hal

ini dapat dilakukan dengan cara menempatkan anggota partai politik dalam parlemen yang terlebih dahulu harus berusaha memenangkan pemilihan umum.

Sigmund Neumann dalam buku karyanya *Modern Political Parties* (dalam Budiarto, 2008: 404) mengemukakan definisi sebagai berikut:

“Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda”. *“(a political party is the articulate organization of society’s active political agent; those who are concerned with the control of governmental policy power, and who compete for popular support with other group or groups holding divergent view)”*.

Dari pendapat di atas, Sigmund mengartikan bahwasanya partai politik yaitu sekelompok organisasi yang terstruktur yang dimana anggotanya mempunyai keinginan serta berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dalam legislatif maupun eksekutif melalui dukungan dari rakyat dengan dan dengan melalui persaingan dengan partai politik lainnya.

Dalam Konteks partai politik di Indonesia, Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 menyebutkan bahwasannya partai politik sebagai suatu organisasi yang memiliki cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggotanya. Dalam pasal 1 tentang ketentuan umum partai politik menyatakan :

“...organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, dan negara, serta memelihara ketuhanan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Sedangkan partai politik berdasarkan komposisi dan fungsi anggotanya, suatu partai politik memiliki karakter yang berbeda satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari para

anggota partai ataupun kader yang mewakili partai tersebut dalam lembaga legislatif. Menurut Ramlan Subakti dalam bukunya ”*Memahami Ilmu Politik*”, setidaknya ada dua penggolongan komposisi dan fungsi anggota partai politik yaitu antara lain:

a. Partai politik massa atau perlindungan

Yaitu partai politik yang mengandalkan kekuatan jumlah anggotanya dengan cara merekrut massa sebanyak-banyaknya dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi setiap kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dimenangkan dengan mudah. Partai politik dengan ciri seperti ini seringkali merupakan gabungan berbagai aliran politik yang sepakat berada dalam lindungan partai guna memperjuangkan kepentingannya.

b. Partai Politik Kader

Yaitu partai politik yang mengandalkan kualitas yang dimiliki oleh anggotanya, ketatnya seleksi dalam perekrutan anggota, dan disiplin anggota sebagai modal kekuatan yang paling utama.

Adam Kuper & Jessica Kaper dalam “*Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*” juga mengklasifikasikan partai politik berdasarkan tiga dimensi utama. “*Pertama*, bentuk organisasi, yang membedakan antara partai yang berbasis massa dan partai yang berbasis kaderisasi. Partai massa memiliki anggota yang relative lebih formal dan bersifat oligarkis. Sedangkan partai kader mempunyai keanggotaan formal yang jauh lebih sedikit. *Kedua*, adalah program partai yang bisa bersifat pragmatis atau ideologis, yang memperhatikan pandangan kiri, kanan, dan tengah. *Ketiga*, pendukung partai yang cenderung netral atau simpatisan partai, yang mungkin kebanyakan berasal dari kelas pekerja, buruh, sebagian besar merupakan kelas menengah, atau golongan yang berada di luar kepentingan ekonomi seperti agama dan suku”. (Kaper, 2008)

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem multi partai, yang dimana terdapat banyak partai politik yang berdiri sebagai bentuk masyarakat yang majameuk, baik secara kultural maupun sosial ekonomi. Surat keputusan Wakil Presiden M. Hatta nomor X/1949 merupakan titik implementasi sistem multi partai di Indonesia (Marijan, 2010). Pada pemilu 1955 terjadi pengelompokan partai menjadi dua ideologi kelompok yaitu kelompok dengan ideologi islam dan kelompok dengan ideologi sekuler. Pengelompokan partai politik tersebut hingga saat ini masih terjadi.

b. Peran Partai Politik

Peran partai politik adalah memberikan proses pendidikan bangsa khususnya untuk generasi bangsa, dan memberikan suatu proses pembangunan baik pembangunan politik, sosial, dan ekonomi.

c. Tujuan Partai Politik (Haryanto D. , 1984)

- 1) Berpartisipasi dalam pemerintahan yaitu dengan mendudukan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat serta mengambil atau menentukan keputusan politik.
- 2) Berusaha melakukan pengawasan. Dalam hal ini bukan hanya pengawasan, tetapi bila perlu oposisi terhadap tindakan, tingkah laku, dan kebijakan para pemegang otoritas.

2. Elit Politik

Kata elit selalu menarik perhatian, dikarenakan kata tersebut sering diartikan sebagai “orang-orang yang menentukan”. Kata elit digunakan untuk menggambarkan barang-barang dengan kualitas yang tinggi, penggunaan kata elit selanjutnya di kembangkan lebih luas untuk merujuk kelompok-kelompok sosial yang lebih tinggi, seperti contohnya unit militer kelas satu tingkat bangsawan yang tinggi.

Elit merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki wewenang politik. Kelas elit ini terdiri dari minoritas terorganisasi yang memaksakan kehendaknya melalui manipulasi maupun kekerasan, khususnya dalam demokrasi (Mas'ood, 2006)

Dalam pengertian yang umum elit menunjuk pada sekelompok orang yang ada dalam masyarakat dan menempati kedudukan tinggi. Dalam pengertian khusus dapat diartikan sebagai sekelompok atau golongan yang terkemuka dibidang-bidang tertentu khususnya para pemangku kekuasaan. Asumsi teori elit Varma (dalam Jainuri 2001:2) mengatakan bahwa dalam masyarakat terbagi dalam dua kategori yaitu: 1) sekelompok kecil manusia yang memiliki kemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah, dan mereka disebut sebagai: (a) elit yang berkuasa dan (b) elit yang tidak berkuasa. 2) sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Elit yang berkuasa jumlahnya relatif lebih sedikit, mereka memiliki kemampuan dan kelebihan untuk memanfaatkan kekuasaan.

Selain itu juga terdapat elit politik yang tidak berkuasa, mereka menjadi lapis kedua dalam strata kekuasaan elit, lapisan elit ini akan menjadi pengganti elit di atasnya jika pada suatu saat elit pemegang kekuasaan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan pemerintahan.

(Putnam dalam Haryanto: 2005, 134-45) menganalisa peran dan pengaruh elit dari prespektif: posisi, reputasi, dan pembuatan keputusan. Perbedaan ketiga perspektif antara lain sebagai berikut: analisa posisi mengandaikan bahwa: (1) orang yang berkuasa diantara sekelompok elit adalah orang yang menduduki posisi puncak dari organisasi formal tersebut, (2) kekuasaan berkolerasi sepenuhnya dengan posisi kelembagaan, (3) analisa posisi merupakan teknik analisa yang mudah dan paling umum dipergunakan untuk mengetahui siapakah sebenarnya orang yang berkuasa di lembaga tersebut, (4)

asumsi analisis ini beranggapan sudah diketahui lembaga-lembaga mana yang secara politis penting dan lembaga-lembaga mana yang mempunyai pengaruh semu, (5) Analisa posisi hanya efektif diterapkan dalam kondisi masyarakat atau organisasi yang memiliki distribusi kekuasaan yang timpang, sementara dalam masyarakat/organisasi yang didistribusi kekuasaan merata analisis ini tidak efektif. Singkatnya analisa ini berasumsi: "siapa menduduki posisi puncak disuatu organisasi, orang itulah yang memiliki peran utama dan mempunyai pengaruh besar dalam gerak organisasi". (Haryanto, 2005)

Analisa reputasi berasumsi bahwa : (1) individu yang oleh sesama warga dianggap memiliki pengaruh, memang yang bersangkutan benar-benar memiliki pengaruh, (2) individu yang oleh orang dianggap memiliki kekuasaan, memang yang bersangkutan benar-benar tidak mendasarkan pada lembaga-lembaga formal tetapi mendasarkan kepada reputasi kekuasaan secara informal yang dimiliki elit.

3. Definisi Relasi

Pada umumnya antara kekuasaan politik dan kemampuan individu atau kelompok saling berhubungan erat untuk memanfaatkan kelompok sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Berbagai macam sumber yang tersedia saat ini banyak sekali seperti media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, dan tokoh masyarakat (Hidayat, 2009). Hubungan kekuasaan merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang menunjukkan hubungan ketidak setaraan. Hal ini disebabkan dalam kekuasaan terkandung unsur pemimpin atau oleh Weber disebut "pengawas yang mengandung perintah".

Max Weber mengatakan, kekuasaan (*power*) adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat atas kemauan- kemauan atau

kehendaknya, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Kekuasaan harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan bukan mendatangkan dominasi yang mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi politik bagi masyarakat. Hak milik berupa benda dan kedudukan adalah sumber kekuasaan, disamping kemampuan khusus dalam bidang ilmu-ilmu politik. Jadi kekuasaan terdapat dimana-mana, dalam hubungan sosial maupun dalam organisasi-organisasi sosial (Pratitis, 2013).

Foucault mengatakan “kuasa tidak selalu bekerja melalui represi dan intimidasi melainkan pertama-tama bekerja melalui aturan-aturan dan normalisasi” (Kebung, 2008:121). Kekuasaan selalu hadir dalam aturan-aturan, sistem-sistem regulasi. Dimana saja manusia juga memiliki hubungan tertentu. Dalam hal ini kemudian kuasa bekerja. Kekuasaan tidak datang dari luar tetapi menentukan susunan, aturan-aturan, dan hubungan dari dalam (Foucault dalam Khoirunnisa, 2015). Tujuan dari adanya mekanisme kekuasaan yaitu membantu setiap individu untuk memilih dedikasi dan disiplin diri agar menjadi yang produktif (Haryatmoko, 2003).

Kekuasaan, menurut pandangan Foucault, tidaklah memiliki (*possessed*) melainkan bermain/dimainkan secara terus menerus. Sehingga kebijakan yang selalu dikaitkan dengan pemerintah itu (*instrumen of governance*) boleh dibidang sebagai alat atau instrumen yang dipakai pemerintah dalam memainkan kekuasaan yang terdapat didalam relasi-relasi antara pemerintah dan individu-individu. Namun, sebaiknya juga para individu pun dapat memainkan kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan kebijakan pemerintah (Zuska, 2005)

F. Definisi Konsep

Sesuai dengan judul penulis yaitu Peran Elit Partai Politik Dalam Melayani Masyarakat (Studi Kasus: Dewan Perwakilan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta Tahun 2017) maka penulis menentukan konsep sebagai berikut :

1. Peran

Peran dalam penelitian ini ditunjukkan kepada keterlibatan elite dari Partai politik dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah terpilih sebagai pejabat publik di DPRD Kota Yogyakarta dalam bentuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. selain itu peran dalam penelitian kali ini juga di tujukan kepada Dewan Perwakilan Daerah PKS Kota Yogyakarta dalam bentuk memperbaiki kinerja dari elit politik fraksi PKS dan juga kader dari Partai Keadilan Sejahtera.

2. Eit politik

Dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera mempunyai peran elit politik yang sebagian besar berasal dari alumnus Universitas Al Azhar, Univ Madinah dan para ustadz ustadz yang berasal dari berbagai pengajian.

Elit Partai Keadilan Sejahtera memiliki kemampuan dan kelebihan untuk menjalankan tugasnya, mereka mampu memegang peran politik sehingga dengan mudah memanfaatkannya demi tujuan yang baik, contohnya: kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan derajat kesejahteraan rakyat dan yang lainnya. Akan tetapi kekuasaan tersebut.sebagai elit parpol harus menjadi cerminan bagi masyaraakt dan mengabdikan diri untuk masyarakat dan Negara Indonesia. Bertindak demokratis untuk menghargai hak-hak warganegara dan terbuka terhadap berbagai golongan serta berkolaborasi diantara para elit politik lainnya untuk mempertahankan kekuasaan.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel (Effendi, 1989). Dengan kata lain definisi operasional ini akan memberikan gambaran mengenai variabel apa sajakah yang dapat digunakan untuk membantu penelitian ini.

1. Indikator-indikator dari pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik antara lain sebagai berikut.
 - 1) Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik
 - a. Usaha pencitraan partai.
 - b. Menjelaskan Visi dan misi Partai politik kepada masyarakat.
 - c. Memberikan informasi yang aktual kepada masyarakat.
 - 2) Partai politik sebagai sarana komunikasi politik
 - a. Media penghubung antara masyarakat dan pemerintah.
 - b. Sarana untuk menyebarkan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah.
 - 3) Partai politik sebagai sarana agregasi dan artikulasi kepentingan
 - a. Adanya kebijakan politik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - b. Pemberi masukan kepada pemerintah melalui aspirasi rakyat yang dibawa oleh partai politik.
2. Peran Elit Partai Keadilan Sejahtera
 - 1) Kritis
 - a. Memberikan masukan kepada pemerintah dan instansi terkait.
 - b. Menyampaikan aspirasi masyarakat.
 - 2) *Emphaty*
 - a. Kepedulian terhadap masyarakat.
 - b. Kecakapan dalam berkomunikasi.

Tabel 1.1
Definisi Konsep dan Definisi Operasional

No	Definisi Konsep	Definisi Operasional	Instrumen	Kuisisioner / wawancara
1	Strategi Partai	Legislatif	Fungsi pengawasan Fungsi penganggaran	K1/w1 K2/w2
		Eksekutif	Masalah pemerintah daerah Masalah Pembangunan daerah	K3/w3 K4/w4
2	Elit Partai	Anggota Legislatif	Kritik terhadap Pemerintah daerah Kritik terhadap kedinasan di daerah	K5/w5 K6/w6
		Anggota Kader	Amar ma'ruf Nahi mungkar	K7/w7 K8/w8
3	Komunikasi Partai dengan Masyarakat	Silaturahmi dengan masyarakat	Dakwah lisan Dakwah perbuatan	K9/w9 K10/w10
		Membangun reputasi politik	Eksternal Internal	K11/w11 K12/w12
		Memberikan ruang politik	Artikulasi Aktualisasi	K13/w13 K14/w14

Dari definisi Konsep dan Operasional diatas maka penulis akan menguraikan instrumen sebagai alat ukur sehingga dengan demikian penulis dapat menentukan kuisisioner dan wawancara.

H. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2012) pengertian Metode Penelitian adalah sebagai berikut:

“Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah ”

Berdasarkan dari penjelasan teori diatas, metode penelitian yaitu salah satu cara untuk mencari, mendapatkan, mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data, baik data primer maupun data skunder yang dapat digunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah dan kemudian dianalisis sesuai dengan fenomena fenomena yang ada, baik fenomena ilmiah maupun buatan manusia, fenomena tersebut dapat berupa aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya dan juga sesuai dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas sehingga akan menimbulkan suatu kebenaran atau mendapatkan data yang diperoleh

Metode Penelitian yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu menuliskan keseluruhan subjek dan objek penelitian secara apa adanya. Menurut (Sugiyono, 2012) metode penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

“Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”

Pada penelitian ini penulis mengambil sampel Purposive Sampling, yang dimana penulis menentukan sendiri jumlah responden yang akan di jadikan sampel sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Yogyakarta.

3) Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diterima oleh peneliti secara langsung dari pihak pertama sebagai responden ataupun sebagai informan yang sifatnya sangat subyektif karena merupakan pendapat pribadi yang bersangkutan.

b) Data Sekunder

Data skunder adalah data yang diterima dari pihak ke tiga yang bentuknya cenderung sudah lebih objektif karena sudah di olah, data ini dapat diperoleh dari hasil kutipan terkait dengan semua informasi yang di DPD PKS Kota Yogyakarta, serta dari sumber dan dikumpulkan dari jurnal, penelitian orang lain, kantor statistik, dan monografi setempat.

Tabel 1.2
Responden

No	Responden	Kuisisioner			Persentase
		Disebar	Kembali	Tidak Kembali	
1	Anggota PKS				
	-Anggota PKS di DPRD	5	5	0	100%
	Anggota PKS Non DPRD	25	25	0	100%
2	Masyarakat				
	-Pedagang	10	10	0	100%
	-Guru	10	10	0	100%
	-Ibu Ruma Tangga	10	10	0	100%
	JUMLAH	60	60	0	100%

I. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuisisioner, Kuisisioner penulis buat sedemikian rupa dimana memiliki tingkat jawaban yang akan dipilih oleh responden yaitu sebagai berikut: Sangat memuaskan, Memuaskan, Biasa saja, Kurang memuaskan, Tidak memuaskan. Dari masing-masing jawaban tidaklah diberi bobot tetapi penulis menghitung berapa banyak responden yang memilih tingkat jawaban dari kuisisioner tersebut.
2. Wawancara, wawancara dibuat sedemikian rupa sebagai lanjutan dan pelengkap dari pertanyaan kuisisioner untuk mengetahui jawaban dari responden mengapa memilih sedemikian rupa. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, yakni memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka dengan informan.
3. Observasi, selama penelitian penulis akan mengamati secara langsung (observasi) dan mencatat tempat kejadian, waktu kejadian, serta apa saja yang terjadi di lapangan saat melakukan penelitian.
4. Dokumentasi, penelaahandokumentasi dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis bahan bacaan berupa buku, jurnal, majalah, dan data tertulis lainnya. Bahan-bahan bacaan tersebut di peroleh baik dari perpustakaan maupun internet.

J. Teknik Pengolahan Data

Setelah memperoleh data-data dari hasil analisis teks dan wawancara, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis yaitu melakukan pengolahan data. Metode yang digunakan yaitu metode Deskriptif analisis, pelaporan data dengan menerangkan, memberi gambar, dan mengklasifikasi, serta menginterpretasi data yang terkumpul apa adanya untuk kemudian ditarik kesimpulan.

K. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif. Teknik analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di interpretasikan. Interpretasi secara terbatas karena peneliti hanya melakukan interpretasi atas data dan hubungan yang ada dalam penelitiannya.

Data kualitatif dipergunakan sebagai landasan untuk menganalisis secara deskriptif yaitu sebuah analisis yang hanya mendeskripsikan variabel-variabel penelitian dengan melakukan wawancara dan membandingkan data penelitian dengan teori yang ada. Sehingga hasil akhir dari analisa ini merupakan kemampuan penulis dalam mendeskripsikan suatu permasalahan dalam menggunakan informasi dan fakta yang ada. Penelitian kualitatif tidak selalu mencari sebab akibat, akan tetapi lebih kepada memahami situasi tertentu dan mencoba mendalami gejala yang terjadi lalu diinterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasi yang terjadi.